

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilukada adalah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada ini meliputi pemilu gubernur dan wakil gubernur, Pemilu bupati dan wakil bupati, dan pemilu walikota dan wakil walikota¹.

Dengan lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilukada langsung juga dapat dikatakan atas sebagai koreksi atas sistem pemilukada yang terdahulu yang menggunakan mekanisme perwakilan DPRD. Peralihan sistem perwakilan ke sistem pemilukada langsung menyiratkan bahwa telah adanya sebuah kemajuan dalam sistem politik dan melibatkan rakyat untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsanya sendiri dengan jujur dan adil.

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 Ayat (4) menyatakan

¹ Marzul Veri dkk, 2010 , *Buku Pintar KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Padang, hal.2.

bahwa “gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis².

Sistem pemilukada secara langsung ini dirasakan lebih menjanjikan terciptanya demokratisasi apabila dibandingkan dengan sistem sebelumnya sesuai dengan UU No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ataupun UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, karena kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya secara bebas tanpa adanya tekanan baik berupa intimidasi ataupun kekerasan politik dirasakan sangat luas³.

Pelaksanaan pemilukada langsung ini diselenggarakan oleh KPUD yang kemudian bertanggung jawab kepada DPRD sebagaimana yang tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 57 ayat 1 dan 2 (satu dan dua) tentang pemerintahan daerah yang berbunyi :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah”⁴.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *Public policy*. Selain itu Miriam Budiardjo mengutip pernyataan dari Herbert McClosky mengatakan

²Suharizal,2010, *Jurnal* Problem Rekrutmen Dan Koalisi di Tingkat Partai Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Derah (Evaluasi Pilkada 2005-2008), Konstitusi Pusako Universitas Andalas.

³ Lihat *Tesis*, Faizil Aziz, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilukada Putaran Dua Di kecamatan Harau Kabuparen Lima Puluh Kota Tahun 2010 pdf , <http://www.pasca.unand.ac.id>, diakses tanggal 9 Januari 2013 Pukul 10.00 Wib

⁴*Ibid.*

bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum⁵. Menurut Samuel P. Huntington partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal⁶.

Pemilukada harus mampu melibatkan partisipasi dari masyarakat agar tercipta kedaulatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dari masyarakat disini bukanlah sekedar dalam hal pencoblosan atau pencontrengan akan tetapi masyarakat juga harus terlibat secara aktif dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi ini⁷.

Semakin tinggi tingkat partisipasi seseorang maka menunjukkan bahwa seseorang telah mampu membuktikan bahwa mereka telah dapat memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sedangkan semakin rendah tingkat partisipasi seseorang berarti menunjukkan bahwa orang tersebut kurang mengapresiasi minat mereka terhadap kegiatan kenegaraan. Partisipasi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai sebuah kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dari masyarakat.

Partisipasi juga dapat dimaknai sebagai pengambilan atau pengikutsertaan. Selain itu Yalvema Miaz dalam bukunya yang berjudul

⁵Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 367.

⁶Samuel P Huntington & Joan Nelson, 1994, *Partisipasi politik Di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.6.

⁷Habib Syafingi, 2009, *Jurnal Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Konstitusi PKHP-FH Universitas Janabadra Yogyakarta Volume II Nomor 1.

partisipasi politik pola perilaku pemilih pada masa orde baru dan reformasi juga menyebutkan teori partisipasi Adams yaitu partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa berpartisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.⁸

Agar terwujudnya sebuah partisipasi pada masyarakat dalam menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara untuk turut ikut serta dalam bagian dari kegiatan politik, di perlukan sebuah penanaman sikap dan perilaku pada masyarakat agar mereka paham dan sadar akan pentingnya sebuah partisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang adalah pendidikan politik. Marita Ahdiyana menyebutkan pendidikan politik itu menurut Safrudin merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.⁹

Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Dengan demikian pendidikan politik ini memiliki

⁸ Yalvema Miaz, 2012, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*, UNP Press, Padang, hal.20-21.

⁹ Marita Ahdiyana, 2009, *Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan politik*, staff.uny.ac.id/.../**pendidikan**/.../Pemilu%20%20sebagai%20Wahana%20.PDF, hal.3, di akses tanggal 8 Desember 2013, pukul 14.00 Wib.

tujuan diantaranya, membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif.¹⁰

Pemilukada juga dapat dikatakan sebagai salah satu wahana dari pendidikan politik. Karena dengan diberikannya pendidikan politik kepada seseorang maka akan menimbulkan keinginan bagi orang tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Individu yang telah mendapat pendidikan tentang politik dan mendapat penyuluhan serta seminar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan politik dapat termotivasi dan turut aktif berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik terutama pada pemilukada, serta dapat merubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri.

Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Untuk menumbuhkan kesadaran politik maka dapat ditempuh dengan dialog dan pengajaran instruktif.¹² Yang dimaksud dengan dialog disini adalah adanya sebuah diskusi mengenai kegiatan politik ataupun isu politik yang ada dan kemudian selenggarakan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan pengajaran instruktif merupakan sebuah kegiatan yang

¹⁰ *Ibid*, Hal. 3.

¹¹ Lihat *skripsi*, Omta Purba, Hubungan Tingkat Kesadaran Politik Dengan Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahan, Timbangan, Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pdf , www.akademik.unsri.ac.id/paper3/download/.../TA_07081002073.pdf, diakses tanggal 25 Desember 2013, pukul 15.00 Wib, hal. 6.

¹² Marita Adhiyana, *Op.cit*, Hal.4

dilakukan oleh seseorang untuk menanamkan sikap, prilaku dan unsur-unsur politik kedalam diri seseorang.

Ramlan Surbakti¹³ juga mengutip pernyataan dari Milbrath dan Goel mengenai sikap masyarakat dapat di bagi menjadi beberapa kategori diantaranya : Pertama apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, artinya mereka secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktifis partai dan pekerja kampanye, dan aktifis masyarakat.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan pemilukada secara langsung dimulai sejak tahun 2005 yang diikuti oleh 13 Kecamatan diantaranya : Kecamatan Suliki, Guguk, Payakumbuh, Luak, Harau, Pangkalan Koto Baru, Kapur IX, Gunuang Omeh, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Mungka, Bukik Barisan dan Akabiluru, dan pada pemilukada tahun 2005 tersebut adapun perolehan suara pada kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

¹³ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal.143.

Tabel 1.1
Data Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada
Pemilukada Tahun 2005

No	Kecamatan	DPT	Partisipasi Pemilih	Persentase (%)
1	Suliki	9.551	7.648	80 %
2	Guguak	22.645	17.156	75,7 %
3	Payakumbuh	19.440	14.945	76,8 %
4	Luak	16.219	12.323	75,9 %
5	Harau	26.744	20.907	78,2 %
6	Pangkalan	17.300	11.776	68 %
7	Kapur IX	16.204	12.474	76,9 %
8	Gunuang Omeh	8.464	7.264	85,8 %
9	Lareh Sago Halaban	22.451	16.843	75 %
10	Situjuah Limo Nagari	12.828	9.874	76,9 %
11	Mungka	15.838	11.109	70,1 %
12	Bukik Barisan	15.541	10.992	70,7 %
13	Akabiluru	17.273	10.910	63,1%
	Jumlah	220.498	164.221	74,5 %

Sumber : KPU Lima Puluh Kota 2005

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat pada pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2005 adalah sebesar 74,5 %.

Selanjutnya pada tahun 2010 Kabupaten Lima Puluh Kota mengadakan kembali pemilukada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Data Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada
Pemilukada Tahun 2010

NO	Kecamatan	DPT	Partisipasi Pemilih	Pesentase (%)
1	Suliki	10.381	6.747	64,99
2	Guguak	24.437	13.971	57,17
3	Payakumbuh	22.856	14.025	61,36
4	Luak	17.544	9.948	56,70
5	Harau	31.646	17.878	56,49
6	Pangkalan	19.809	11.135	56,21
7	Kapur IX	18.609	10.434	56,07
8	Gunuang Omeh	9.541	5.745	60,21
9	Lareh Sago Halaban	25.133	15.012	59,73
10	Situjuah Limo Nagari	14.234	9.320	59,73
11	Mungka	17.777	10.334	58,19
12	Bukik Barisan	16.623	9.401	56,55
13	Akabiluru	19.747	9.067	45,92
	Jumlah	248.337	143.017	57,58

Sumber : KPU Lima Puluh Kota 2010

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemilukada tahun 2010 sebesar 57,58 %.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diatas menunjukkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pada pemilukada tahun 2005 masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki DPT sebanyak 220.498 orang atau sekitar 74,5 % yang mengikuti pemilukada, sedangkan pada pemilukada tahun 2010 DPT masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 143.017 orang atau 57,58 %. Dari hasil pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005 dan pemilukada tahun 2010 terlihat penurunan partisipasi masyarakat sebesar 16,9 %

Disamping itu juga terjadi penurunan partisipasi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada pemilihan Legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan pemilihan Gubernur pada tahun 2010, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Data Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Legislatif dan Gubernur tahun 2009 dan 2010

No	Kecamatan	Pileg 2009		Pilgub 2010	
		Partisipasi	Persentase	Partisipasi	Persentase
1	Suliki	7.594	76,5 %	7.162	75,4 %
2	Guguak	17.146	72,2 %	15.945	65,2 %
3	Payakumbuh	15.373	72,5 %	14.864	65 %
4	Luak	12.783	75,4 %	11.409	65 %
5	Harau	21.838	74 %	20.419	64,5 %
6	Pangkalan Koto Baru	12.989	71 %	12.122	61,1 %
7	Kapur IX	14.257	78,7 %	11.392	61,2 %
8	Gunuang Omeh	6.673	71 %	6.249	65,5 %
9	Lareh Sago Halaban	17.655	74,1 %	16.757	66,6 %
10	Situjuah Limo Nagari	10.517	74,4 %	10.077	70,8 %
11	Mungka	11.887	73,3 %	11.042	62,1 %
12	Bukik Barisan	12.168	74,8 %	10.275	61,8 %
13	Akabiluru	11.742	66,1 %	10.590	53,6 %

Sumber : KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 2010

Penurunan partisipasi masyarakat tersebut juga memiliki pengaruh terhadap kesadaran politik masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Kesadaran politik dapat memunculkan peran aktif masyarakat untuk turut ikut berpartisipasi dalam pemilukada serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan adanya kesadaran politik, berarti adanya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pengaturan urusan mereka, aturan seperti apa dan siapa yang akan menjalankan aturan tersebut.¹⁴

¹⁴ Omta Purba, *op.cit*, hal.4.

Partisipasi politik dari warga negara erat kaitanya dengan kesadaran politik. Dimana nantinya partisipasi dapat memunculkan kesadaran politik kepada masyarakat untuk ikut dalam kegiatan politik seperti pemilu. Pada tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian tertarik untuk mengambil tingkat kesadaran politik dan tingkat partisipasi politik sebagai variabel dalam penelitian ini guna mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan antara kesadaran politik dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana hubungan antara kesadaran politik dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemilu tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kesadaran politik dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

- a.** Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah penelitian dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.
- b.** Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi KPU di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengetahui hubungan kesadaran politik dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilukada.